



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : SP DIPA- 063.01.1.445155/2025**

**A. Dasar Hukum:**

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

**B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:**

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(063)	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
2. Unit Organisasi	:	(01)	Badan Pengawas Obat dan Makanan
3. Provinsi	:	(01)	DKI JAKARTA
4. Kode/Nama Satker	:	(445155)	DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF
Sebesar	:	Rp. 50.358.861.000	( LIMA PULUH Miliar TIGA RATUS LIMA PULUH DELAPAN JUTA DELAPAN RATUS ENAM PULUH SATU RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

07 KESEHATAN  
07.01 OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

**Terlampir**

**C. Sumber Dana Berasal Dari :**

1. Rupiah Murni	Rp.	36.752.204.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	13.606.657.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

**D. Pencairan dana dilakukan melalui :**

1. KPPN JAKARTA VI (175) Rp. 50.358.861.000

**E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)**

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024

A.N. MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.

ISA RACHMATARWATA  
NIP. 196612301991021001

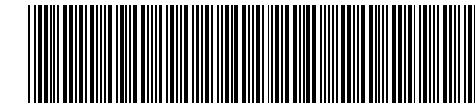
**LAMPIRAN**  
**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**  
**NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025**



DS:0596-9916-1630-6080

Satker : (445155) DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

DR	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Rp.	50.358.861.000
DR.3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Rp.	2.862.455.000
DR.4122	Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Rp.	6.887.731.000
DR.4123	Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Eksport Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Rp.	11.315.272.000
DR.4125	Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Rp.	9.420.920.000
DR.4127	Registrasi Obat	Rp.	12.654.921.000
DR.4131	Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Rp.	7.217.562.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN****TAHUN ANGGARAN 2025****NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025****I A. INFORMASI KINERJA**

DS:0596-9916-1630-6080

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
 Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan  
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
 Kode/Nama Satker : (445155) DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Halaman : I A. 1

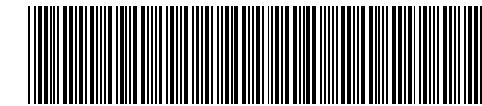
Program	:	063.01.DR	Program Pengawasan Obat dan Makanan	50.358.861.000
Kegiatan	:	3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	2.862.455.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase Obat yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
		2. 01	Persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan	
		3. 01	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
		4. 01	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	
		5. 01	Persentase sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	
		6. 01	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
		7. 02	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
		8. 02	Persentase Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
		9. 02	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di masing-masing wilayah kerja UPT	
		10. 02	Persentase laboratorium pengawasan obat dan makanan yang sesuai Good Laboratory Practise	
		11. 02	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	
		12. 03	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	
		13. 03	Jumlah desa pangan aman di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
		14. 03	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
		15. 03	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
		16. 04	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
		17. 04	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
		18. 04	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
		19. 05	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	
		20. 05	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
		21. 06	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	

## DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025

## I A. INFORMASI KINERJA



DS:0596-9916-1630-6080

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
 Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan  
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
 Kode/Nama Satker : (445155) DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Halaman : I A. 2

## Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

22. 07 Persentase UMKM yang memenuhi standar

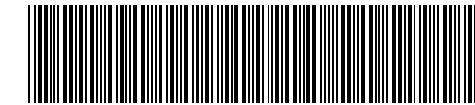
Klasifikasi Rincian Output 1	:	3165.BKB	Pemantauan produk	1,00	laporan	2.862.455.000
Rincian Output	:	01	BKB.001 Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1.00	laporan	2.862.455.000
Kegiatan	:	4122	Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor			6.887.731.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase keputusan hasil pengawasan sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian yang diselesaikan			
		2. 01	Persentase keputusan penilaian sarana distribusi obat yang diselesaikan tepat waktu			
		3. 02	Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor			
		4. 02	Persentase keputusan hasil pengawasan pengelolaan obat pemasukan jalur khusus yang diselesaikan			
		5. 03	Persentase pemenuhan standar pengawasan sarana distribusi dan pelayanan obat oleh Balai			
		6. 03	Persentase stakeholder yang mendapat regulatory assistance di bidang distribusi dan pelayanan obat			
Klasifikasi Rincian Output 2	:	4122.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan	10,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	2.500.000.000
Rincian Output	:	01	ABG.001 Kajian isu distribusi obat dan bahan obat antar lembaga dan/atau stakeholder yang diselesaikan	10.00	Rekomendasi Kebijakan	2.500.000.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	4122.QAH	Pelayanan Publik Lainnya	490,00	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	781.046.000
Rincian Output	:	01	QAH.001 Keputusan Penilaian Sarana Distribusi Obat yang Diselesaikan Sesuai Standar	490.00	dokumen	781.046.000

## DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025

## I A. INFORMASI KINERJA



DS:0596-9916-1630-6080

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
 Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan  
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
 Kode/Nama Satker : (445155) DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Halaman : I A. 3

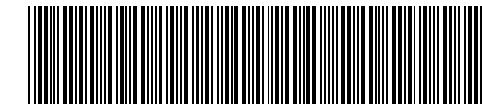
Klasifikasi Rincian Output	4	4122.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	167,00	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan	3.606.685.000	
Rincian Output		01	QIC.001 Keputusan hasil pengawasan fasilitas distribusi dan fasilitas penyerahan obat yang diselesaikan	(PN)	167,00	Keputusan	3.606.685.000
Kegiatan		4123	Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif				11.315.272.000
Indikator Kinerja Kegiatan		1. 01	Persentase laporan Farmakovigilans yang ditindaklanjuti				
		2. 01	Persentase permohonan persetujuan iklan obat yang diselesaikan tepat waktu				
		3. 02	Jumlah label dan iklan produk tembakau yang diawasi yang memenuhi ketentuan				
		4. 02	Jumlah permohonan ekspor impor Obat dan NPP yang diselesaikan tepat waktu				
		5. 02	Persentase laporan pengawasan mutu Obat dan NPP yang diselesaikan				
		6. 03	Persentase laporan pengawasan iklan dan penandaan obat NPP yang diselesaikan				
Klasifikasi Rincian Output	5	4123.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	22.500,00	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	747.994.000	
Rincian Output		01	BAH.001 Surat Keterangan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor yang Diselesaikan Tepat Waktu	22500,00	dokumen	747.994.000	
Klasifikasi Rincian Output	6	4123.BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	1.500,00	Produk, Laporan, Keputusan	2.427.804.000	
Rincian Output		01	BIA.001 Keputusan hasil pengawasan mutu obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor yang diselesaikan	140,00	Laporan	1.654.100.000	
		02	BIA.002 Keputusan hasil pengawasan iklan dan penandaan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor yang diselesaikan	1360,00	Laporan	773.704.000	
Klasifikasi Rincian Output	7	4123.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	10,00	Orang, Laporan	2.500.000.000	
Rincian Output		01	BIB.001 Materi KIE di bidang obat yang disusun dan disosialisasikan	10,00	Laporan	2.500.000.000	

## DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025

## I A. INFORMASI KINERJA



DS:0596-9916-1630-6080

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
 Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan  
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
 Kode/Nama Satker : (445155) DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Halaman : I A. 4

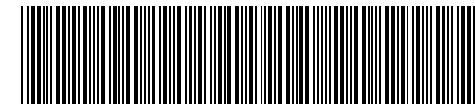
Klasifikasi Rincian Output	8	4123.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	6.012,00	Produk, Laporan, Keputusan	5.639.474.000		
Rincian Output		01	QIA.001	Informasi produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang memenuhi ketentuan	(PN)	6000.00	Produk	1.117.647.000
		02	QIA.002	Laporan tindak lanjut regulatori terkait keamanan obat beredar yang dikomunikasikan	(PN)	12.00	Laporan	4.521.827.000
Kegiatan		4125	Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor					9.420.920.000
Indikator Kinerja Kegiatan		1. 01	Percentase fasilitas produksi produk JKN, produk highrisk lainnya, serta bahan baku obat yang diawasi sesuai standar					
		2. 01	Percentase keputusan penilaian fasilitas produksi Bahan Baku Obat, obat, produk biologi, dan sarana khusus yang diselesaikan tepat waktu					
		3. 01	Percentase sarana produksi obat JKN, Bahan Baku Obat, dan obat highrisk lainnya yang mematuhi persyaratan CPOB					
		4. 02	Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor					
		5. 02	Percentase tindak lanjut yang berkualitas dari hasil pengawasan sarana produksi di Balai					
		6. 03	Percentase hasil pengawasan sarana produksi yang ditindaklanjuti					
Klasifikasi Rincian Output	9	4125.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	22,00	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	4.919.326.000		
Rincian Output		01	BAH.001	Keputusan Hasil Pengawalan Pemenuhan Persyaratan Fasilitas Produksi Obat yang Diterbitkan		17.00	layanan	2.419.326.000
		02	BAH.002	Jumlah UPT Baru yang mandiri dalam inspeksi CPOB untuk Pemenuhan Standar PIC/s dan WHO		5.00	layanan	2.500.000.000
Klasifikasi Rincian Output	10	4125.QAH	Pelayanan Publik Lainnya	84,00	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	2.395.718.000		
Rincian Output		01	QAH.001	Keputusan Penilaian Fasilitas produksi BBO, obat, dan produk biologi, dan sarana khusus yang diselesaikan tepat waktu	(PN)	84.00	layanan	2.395.718.000

## DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025

## I A. INFORMASI KINERJA



DS:0596-9916-1630-6080

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
 Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan  
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
 Kode/Nama Satker : (445155) DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Halaman : I A. 5

Klasifikasi Rincian Output	11	4125.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		150,00	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan Lembaga	2.105.876.000	
Rincian Output		: 01	QIC.001	Fasilitas produksi produk JKN dan produk high risk lainnya serta bahan baku obat yang diawasi sesuai standar	(PN)	150,00		2.105.876.000
Kegiatan		: 4127	Registrasi Obat					12.654.921.000
Indikator Kinerja Kegiatan		: 1. 01		Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Registrasi Obat				
		: 2. 01		Persentase Keputusan Registrasi Obat yang Diselesaikan Sesuai ketentuan				
Klasifikasi Rincian Output	12	4127.ACA	Perizinan Produk		3,00	Produk, Keputusan	1.000.000.000	
Rincian Output		: 01	ACA.001	Pengawalan obat pengembangan baru yang sesuai standar		3,00	Keputusan	1.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output	13	4127.BAH	Pelayanan Publik Lainnya		3,00	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	4.000.000.000	
Rincian Output		: 01	BAH.001	Layanan Publik Registrasi Obat yang Prima		3,00	layanan	4.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output	14	4127.PCA	Perizinan Produk		7.500,00	Produk, Keputusan	7.654.921.000	
Rincian Output		: 01	PCA.001	Keputusan Registrasi Obat yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	(PN)	7500,00	Keputusan	7.654.921.000
Kegiatan		: 4131	Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif					7.217.562.000
		: 1. 01		Indeks kualitas kebijakan pegawasan obat				
Klasifikasi Rincian Output	15	4131.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan		50,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	2.938.245.000	
Rincian Output		: 01	ABG.001	Rekomendasi Kebijakan Produksi, Distribusi, Khasiat, Keamanan dan Mutu Obat yang diselesaikan		50,00	Rekomendasi Kebijakan	2.938.245.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**  
**NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025**  
**I A. INFORMASI KINERJA**



Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
 Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan  
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
 Kode/Nama Satker : (445155) DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Halaman : I A. 6

Klasifikasi Rincian Output	16	4131.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	8,00	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar NSPK	3.061.492.000
Rincian Output		01	AFA.001 Standar Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif yang disusun	8.00	NSPK	3.061.492.000
Klasifikasi Rincian Output	17	4131.CAB	Sarana Bidang Kesehatan	3,00	Paket, Unit	173.975.000
Rincian Output		01	CAB.001 Sarana Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	3.00	Unit	173.975.000
Klasifikasi Rincian Output	18	4131.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	55,00	Unit	1.043.850.000
Rincian Output		01	CAN.001 Perangkat pengolah data dan komunikasi	55.00	Unit	1.043.850.000

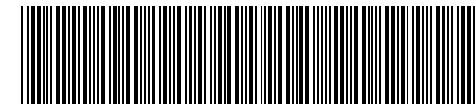
Jakarta, 02 Desember 2024  
 Sekretaris Utama Badan POM

ttd.  
 Jayadi  
 NRP. 69120503

## DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025



DS:0596-9916-1630-6080

## I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
 Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan  
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
 Kode/Nama Satker : (445155) DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Halaman : I B. 1

				Ket :		Pagu	Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	50.358.861.000		a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
1. Rupiah Murni	Rp.	36.752.204.000		(2) RPLN		US\$	0 Rp.
2. PNBP	Rp.	13.606.657.000		b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN		US\$	0 Rp.
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri		IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR	0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUNINI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	1. Pinjaman Luar Negeri	2. Hibah Luar Negeri	3. Pinjaman Dalam Negeri	4. Hibah Dalam Negeri	1) Mata Uang NPP/H	2) Ekuivalen USD	3) Ekuivalen Rupiah	4) LC	5) -
Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025



DS:0596-9916-1630-6080

## II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan

Provinsi : (01) DKI JAKARTA

Kode/Nama Satker : (445155) DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Halaman : II. 1

Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
445155	DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF	-	48.536.036	1.822.825	-	-	50.358.861		
063.01.DR	Program Pengawasan Obat dan Makanan	-	48.536.036	1.822.825	-	-	50.358.861		
3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	-	2.862.455	-	-	-	2.862.455		
3165.BKB	Pemantauan produk (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.862.455	-	-	-	2.862.455	01 . 51	
01	RM	-	2.862.455	-	-	-	2.862.455	175@	
4122	Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan	-	6.592.731	295.000	-	-	6.887.731		
4122.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.305.000	195.000	-	-	2.500.000	01 . 51	
01	RM	-	2.305.000	195.000	-	-	2.500.000	175@	
4122.QAH	Pelayanan Publik Lainnya (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	681.046	100.000	-	-	781.046	01 . 51	
01	RM	-	246.737	-	-	-	246.737	175@	

## DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025



DS:0596-9916-1630-6080

## II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan

Provinsi : (01) DKI JAKARTA

Kode/Nama Satker : (445155) DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Halaman : II. 2

Kewenangan : (KP)

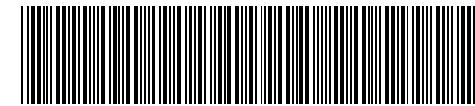
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	PNBP		434.309	100.000			534.309	175@	
4122.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)		3.606.685				3.606.685	01 . 51	
01	RM		2.480.065				2.480.065	175@	
04	PNBP		1.126.620				1.126.620	175@	
4123	Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif		11.235.272	80.000			11.315.272		
4123.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)		747.994				747.994	01 . 51	
01	RM		389.892				389.892	175@	
04	PNBP		358.102				358.102	175@	
4123.BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)		2.427.804				2.427.804	01 . 51	
01	RM		1.809.672				1.809.672	175@	
04	PNBP		618.132				618.132	175@	

## DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025



DS:0596-9916-1630-6080

## II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan

Provinsi : (01) DKI JAKARTA

Kode/Nama Satker : (445155) DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Halaman : II. 3

Kewenangan : (KP)

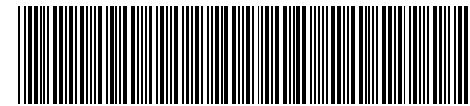
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4123.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)		-	2.500.000	-	-	-	2.500.000	01 . 51
01	RM		-	1.350.598	-	-	-	1.350.598	175@
04	PNBP		-	1.149.402	-	-	-	1.149.402	175@
4123.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)		-	5.559.474	80.000	-	-	5.639.474	01 . 51
01	RM		-	5.142.042	80.000	-	-	5.222.042	175@
04	PNBP		-	417.432	-	-	-	417.432	175@
4125	Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor		-	9.420.920	-	-	-	9.420.920	
4125.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)		-	4.919.326	-	-	-	4.919.326	01 . 51
01	RM		-	4.119.326	-	-	-	4.119.326	175@
04	PNBP		-	800.000	-	-	-	800.000	175@

## DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025



DS:0596-9916-1630-6080

## II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan

Provinsi : (01) DKI JAKARTA

Kode/Nama Satker : (445155) DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Halaman : II. 4

Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4125.QAH	Pelayanan Publik Lainnya (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)		-	2.395.718	-	-	-	2.395.718	01 . 51
01	RM		-	849.518	-	-	-	849.518	175@
04	PNBP		-	1.546.200	-	-	-	1.546.200	175@
4125.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)		-	2.105.876	-	-	-	2.105.876	01 . 51
01	RM		-	2.105.876	-	-	-	2.105.876	175@
4127	Registrasi Obat		-	12.554.921	100.000	-	-	12.654.921	
4127.ACA	Perizinan Produk (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)		-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	01 . 51
01	RM		-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	175@
4127.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)		-	3.900.000	100.000	-	-	4.000.000	01 . 51
01	RM		-	3.900.000	100.000	-	-	4.000.000	175@

## DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025



DS:0596-9916-1630-6080

## II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan

Provinsi : (01) DKI JAKARTA

Kode/Nama Satker : (445155) DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Halaman : II. 5

Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4127.PCA	Perizinan Produk (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)		-	7.654.921	-	-	-	7.654.921	01 . 51
01	RM		-	1.564.586	-	-	-	1.564.586	175@
04	PNBP		-	6.090.335	-	-	-	6.090.335	175@
4131	Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif		-	5.869.737	1.347.825	-	-	7.217.562	
4131.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)		-	2.838.245	100.000	-	-	2.938.245	01 . 51
01	RM		-	2.838.245	100.000	-	-	2.938.245	175@
4131.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)		-	3.031.492	30.000	-	-	3.061.492	01 . 51
01	RM		-	3.031.492	30.000	-	-	3.061.492	175@
4131.CAB	Sarana Bidang Kesehatan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)		-	-	173.975	-	-	173.975	01 . 51
01	RM		-	-	42.930	-	-	42.930	175

## DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025



DS:0596-9916-1630-6080

## II. RINCIAN PENGELUARAN

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan

Provinsi : (01) DKI JAKARTA

Kode/Nama Satker : (445155) DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Halaman : II. 6

Kewenangan : (KP)

(dalam ribuan rupiah)

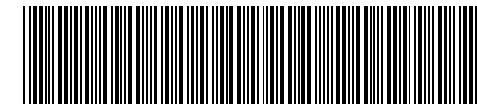
KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	PNBP			131.045			131.045	175	
4131.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)			1.043.850			1.043.850	01 . 51	
01	RM			208.770			208.770	175	
04	PNBP			835.080			835.080	175	
		JUMLAH	-	48.536.036	1.822.825	-	-	50.358.861	

Jakarta, 02 Desember 2024  
Sekretaris Utama Badan POMttd.  
Jayadi  
NRP. 69120503

## DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025



DS:0596-9916-1630-6080

## III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan

Provinsi : (01) DKI JAKARTA

Kode/Nama Satker : (445155) DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

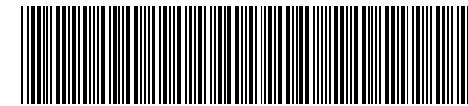
Halaman : III. 1  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	445155	DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF													
		RENCANA PENARIKAN DANA	1.578.909	2.701.656	4.009.448	3.696.988	4.641.126	4.931.116	3.760.412	4.443.830	5.145.045	4.821.942	4.990.282	5.638.107	50.358.861
		BELANJA BARANG	1.573.908	2.677.898	3.754.926	3.457.693	4.302.245	4.650.525	3.677.048	4.335.758	5.080.024	4.584.885	4.942.691	5.494.435	48.536.036
063.01.DR.3165		BELANJA MODAL	5.001	23.758	254.522	239.295	338.881	280.592	83.365	108.071	65.020	237.057	47.591	139.672	1.822.825
		Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	11.872	198.214	285.725	190.731	349.743	265.810	223.952	246.191	303.572	205.659	205.622	375.364	2.862.455
063.01.DR.4122		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	11.872	198.214	285.725	190.731	349.743	265.810	223.952	246.191	303.572	205.659	205.622	375.364	2.862.455
		Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	0	342.637	686.273	343.137	1.029.410	1.029.410	343.137	686.273	686.273	343.137	686.273	711.773	6.887.731
063.01.DR.4123		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	327.887	656.773	328.387	985.160	985.160	328.387	656.773	656.773	328.387	656.773	682.273	6.592.731
		53 BELANJA MODAL	0	14.750	29.500	14.750	44.250	44.250	14.750	29.500	29.500	14.750	29.500	29.500	295.000
063.01.DR.4125		Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Eksport Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	677.178	747.419	910.288	960.607	892.774	996.547	1.090.129	1.017.598	1.089.387	1.121.141	1.034.292	777.912	11.315.272
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	677.177	743.410	906.957	950.449	882.682	982.901	1.090.129	1.002.554	1.071.990	1.121.141	1.027.969	777.912	11.235.272
063.01.DR.4125		53 BELANJA MODAL	1	4.008	3.331	10.158	10.093	13.646	0	15.044	17.397	0	6.323	0	80.000
		Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	668.926	668.926	668.926	846.821	816.824	1.024.717	668.926	668.926	846.821	846.821	846.821	847.467	9.420.920

## DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025



DS:0596-9916-1630-6080

## III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan

Provinsi : (01) DKI JAKARTA

Kode/Nama Satker : (445155) DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Halaman : III. 2  
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
063.01.DR.4127	52 BELANJA BARANG DAN BARANG	668.926	668.926	668.926	846.821	816.824	1.024.717	668.926	668.926	846.821	846.821	846.821	846.821	847.467	9.420.920
	Registrasi Obat	220.933	744.461	848.204	831.734	932.213	964.573	744.375	1.177.104	1.299.908	1.533.207	1.681.470	1.676.737	1.676.737	12.654.921
063.01.DR.4131	52 BELANJA BARANG DAN BARANG	215.933	739.461	838.204	826.734	922.213	954.573	739.375	1.167.104	1.289.908	1.523.207	1.671.470	1.666.737	1.666.737	12.554.921
	53 BELANJA MODAL	5.000	5.000	10.000	5.000	10.000	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000
	Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	0	0	610.032	523.959	620.161	650.060	689.894	647.737	919.084	771.977	535.803	1.248.854	1.248.854	7.217.562
	52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	0	398.340	314.572	345.623	437.364	626.279	594.210	910.960	559.670	534.036	1.148.683	1.148.683	5.869.737
	53 BELANJA MODAL	0	0	211.691	209.387	274.539	212.696	63.615	53.527	8.124	212.307	1.768	100.172	100.172	1.347.825
	PERKIRAAN PENERIMAAN	3.844.090	3.844.090	3.844.090	3.844.090	3.844.090	3.844.090	3.844.090	3.844.090	3.844.090	3.844.090	3.844.090	3.844.110	3.844.110	46.129.100
	- PNBP (425321)	553.000	553.000	553.000	553.000	553.000	553.000	553.000	553.000	553.000	553.000	553.000	553.000	553.000	6.636.000
	- PNBP (425321)	2.878.841	2.878.841	2.878.841	2.878.841	2.878.841	2.878.841	2.878.841	2.878.841	2.878.841	2.878.841	2.878.841	2.878.841	2.878.841	34.546.100
	- PNBP (425321)	246.416	246.416	246.416	246.416	246.416	246.416	246.416	246.416	246.416	246.416	246.416	246.416	246.416	2.957.000
	- PNBP (425321)	165.833	165.833	165.833	165.833	165.833	165.833	165.833	165.833	165.833	165.833	165.833	165.833	165.837	1.990.000

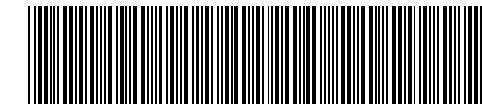
Jakarta, 02 Desember 2024  
Sekretaris Utama Badan POMttd.  
Jayadi  
NRP. 69120503

## DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025

## IV A. B L O K I R



DS:0596-9916-1630-6080

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan

Provinsi : [01] DKI JAKARTA

Kode dan Nama Satker : [445155] DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Halaman : IV.A. 1

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
445155	DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF	4122	Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor
063.01.DR	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 25.837.021	4122.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan
3165	52 Belanja Barang Rp. 25.442.021	521211	Belanja Bahan(RM)
	53 Belanja Modal Rp. 395.000	521211	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 119.882
	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Disposisi:	Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden
	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	522151	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasianya dan/atau dokumen terkait
3165.BKB	Pemantauan produk	522151	Belanja Jasa Profesi(RM)
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)	522191	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 47.600
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 80.845	Disposisi:	Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024	522191	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasianya dan/atau dokumen terkait
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524111	Belanja Jasa Lainnya(RM)
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)	524111	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 212.019
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 29.050	Disposisi:	Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024	524111	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasianya dan/atau dokumen terkait
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)	524111	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 420.594
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 187.180	Disposisi:	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024	524113	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)	524113	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 28.680
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 297.938	Disposisi:	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024	524114	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
	524219 Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri(RM)	524114	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.077.160
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 140.319	Disposisi:	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024	524119	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**  
**NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025**  
**IV A. B L O K I R**



DS:0596-9916-1630-6080

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan

Provinsi : [01] DKI JAKARTA

Kode dan Nama Satker : [445155] DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Halaman : IV.A. 2

(dalam ribuan rupiah)

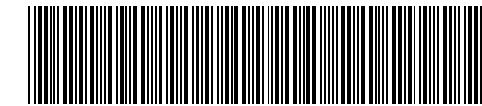
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
4122.QAH	<p>Tidak Dapat Dicairkan Rp. 399.065 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</p> <p>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 536121 Belanja Penambahan Nilai Fisik Lainnya(RM)</p> <p>Tidak Dapat Dicairkan Rp. 195.000 Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden</p> <p>Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait</p> <p><b>Pelayanan Publik Lainnya</b></p> <p>524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)</p> <p>Tidak Dapat Dicairkan Rp. 65.571 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</p> <p>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)</p> <p>Tidak Dapat Dicairkan Rp. 140.148 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</p> <p>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)</p> <p>Tidak Dapat Dicairkan Rp. 12.920 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</p> <p>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)</p> <p>Tidak Dapat Dicairkan Rp. 39.729 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</p> <p>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP)</p> <p>Tidak Dapat Dicairkan Rp. 45.360 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</p> <p>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</p>	4122.QIC	<p><b>Pengawasan dan Pengendalian Lembaga</b></p> <p>524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)</p> <p>Tidak Dapat Dicairkan Rp. 580.836 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</p> <p>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)</p> <p>Tidak Dapat Dicairkan Rp. 93.723 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</p> <p>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)</p> <p>Tidak Dapat Dicairkan Rp. 26.580 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</p> <p>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)</p> <p>Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.850 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</p> <p>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)</p> <p>Tidak Dapat Dicairkan Rp. 43.820 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</p> <p>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP)</p> <p>Tidak Dapat Dicairkan Rp. 115.682 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</p> <p>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)</p> <p>Tidak Dapat Dicairkan Rp. 218.684 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</p>

## DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025

## IV A. B L O K I R



DS:0596-9916-1630-6080

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan

Provinsi : [01] DKI JAKARTA

Kode dan Nama Satker : [445155] DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Halaman : IV.A. 3

(dalam ribuan rupiah)

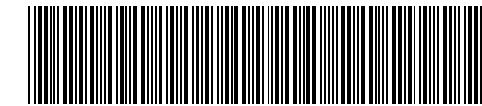
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 56.008 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 71.338 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
4123	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524219 Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 85.064 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 166.635 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
4123.BAH	<b>Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Eksport Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif</b> <b>Pelayanan Publik Lainnya</b> Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 76.078 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024	4123.BIA	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.520 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 17.940 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 189.648 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 15.350 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 21.996 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 19.000 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 327.045 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 69.849		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)

## DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025

## IV A. B L O K I R



DS:0596-9916-1630-6080

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan

Provinsi : [01] DKI JAKARTA

Kode dan Nama Satker : [445155] DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Halaman : IV.A. 4

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
	<p>Tidak Dapat Dicairkan Rp. 141.096 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</p> <p>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</p> <p>524219 Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri(RM)</p> <p>Tidak Dapat Dicairkan Rp. 43.000 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</p> <p>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</p>		<p>Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.400 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</p> <p>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</p> <p>524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP)</p> <p>Tidak Dapat Dicairkan Rp. 139.950 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</p> <p>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</p> <p>524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)</p> <p>Tidak Dapat Dicairkan Rp. 827.709 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</p> <p>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</p> <p>524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)</p> <p>Tidak Dapat Dicairkan Rp. 409.500 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</p> <p>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</p>
4123.BIB	<p><b>Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat</b></p> <p>521211 Belanja Bahan(RM)</p> <p>Tidak Dapat Dicairkan Rp. 128.739 Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden</p> <p>Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait</p> <p>521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM)</p> <p>Tidak Dapat Dicairkan Rp. 19.550 Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden</p> <p>Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait</p> <p>522151 Belanja Jasa Profesi(RM)</p> <p>Tidak Dapat Dicairkan Rp. 54.600 Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden</p> <p>Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait</p> <p>524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)</p> <p>Tidak Dapat Dicairkan Rp. 320.000 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</p> <p>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</p> <p>524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)</p> <p>Tidak Dapat Dicairkan Rp. 454.168 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</p> <p>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</p> <p>524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)</p>	4123.QIA	<p>Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.400 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</p> <p>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</p> <p>524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP)</p> <p>Tidak Dapat Dicairkan Rp. 139.950 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</p> <p>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</p> <p>524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)</p> <p>Tidak Dapat Dicairkan Rp. 827.709 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</p> <p>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</p> <p>524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)</p> <p>Tidak Dapat Dicairkan Rp. 409.500 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</p> <p>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</p> <p>524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)</p> <p>Tidak Dapat Dicairkan Rp. 352.140 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</p> <p>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</p> <p>524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)</p> <p>Tidak Dapat Dicairkan Rp. 118.716 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</p> <p>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</p> <p>524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)</p> <p>Tidak Dapat Dicairkan Rp. 24.830 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</p> <p>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</p>

## DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025

## IV A. B L O K I R



DS:0596-9916-1630-6080

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan

Provinsi : [01] DKI JAKARTA

Kode dan Nama Satker : [445155] DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Halaman : IV.A. 5

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 952.694 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasianya dan/atau dokumen terkait 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 182.005 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 863.070 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 9.690 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	524219 Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 80.000 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 799.336 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
4125	<b>Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor</b>		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
4125.BAH	<b>Pelayanan Publik Lainnya</b>		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 127.929 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 57.034 Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasianya dan/atau dokumen terkait		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.070.307 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 134.307 Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasianya dan/atau dokumen terkait		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 104.772 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	522141 Belanja Sewa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.525 Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasianya dan/atau dokumen terkait		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524219 Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 823.200 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 61.800 Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**  
**NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025**  
**IV A. B L O K I R**



DS:0596-9916-1630-6080

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan

Provinsi : [01] DKI JAKARTA

Kode dan Nama Satker : [445155] DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Halaman : IV.A. 6

(dalam ribuan rupiah)

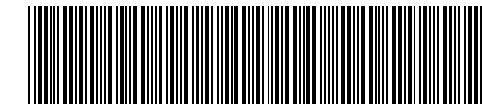
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
4125.QAH	<p>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</p> <p>524219 Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri(PNBP)</p> <p>Tidak Dapat Dicairkan Rp. 125.000</p> <p>Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</p> <p>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</p> <p><b>Pelayanan Publik Lainnya</b></p> <p>524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)</p> <p>Tidak Dapat Dicairkan Rp. 218.914</p> <p>Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</p> <p>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</p> <p>524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)</p> <p>Tidak Dapat Dicairkan Rp. 12.500</p> <p>Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</p> <p>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</p> <p>524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)</p> <p>Tidak Dapat Dicairkan Rp. 10.260</p> <p>Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</p> <p>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</p> <p>524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)</p> <p>Tidak Dapat Dicairkan Rp. 132.177</p> <p>Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</p> <p>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</p> <p>524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP)</p> <p>Tidak Dapat Dicairkan Rp. 245.775</p> <p>Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</p> <p>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</p> <p>524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)</p> <p>Tidak Dapat Dicairkan Rp. 26.604</p>	4125.QIC	<p>Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</p> <p>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</p> <p>524211 Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri(PNBP)</p> <p>Tidak Dapat Dicairkan Rp. 174.300</p> <p>Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</p> <p>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</p> <p>524219 Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri(PNBP)</p> <p>Tidak Dapat Dicairkan Rp. 200.000</p> <p>Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</p> <p>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</p> <p><b>Pengawasan dan Pengendalian Lembaga</b></p> <p>524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)</p> <p>Tidak Dapat Dicairkan Rp. 462.758</p> <p>Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</p> <p>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</p> <p>524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)</p> <p>Tidak Dapat Dicairkan Rp. 10.260</p> <p>Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</p> <p>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</p> <p>524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)</p> <p>Tidak Dapat Dicairkan Rp. 88.406</p> <p>Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</p> <p>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</p> <p>524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)</p> <p>Tidak Dapat Dicairkan Rp. 395.076</p> <p>Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</p> <p>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</p> <p><b>Registrasi Obat</b></p>
		4127	

## DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025

## IV A. B L O K I R



DS:0596-9916-1630-6080

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan

Provinsi : [01] DKI JAKARTA

Kode dan Nama Satker : [445155] DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Halaman : IV.A. 7

(dalam ribuan rupiah)

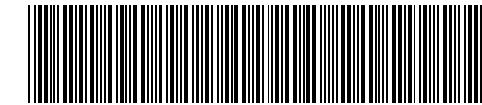
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
4127.ACA	<b>Perizinan Produk</b>	4127.BAH	<b>Pelayanan Publik Lainnya</b>
521211	Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden	521111	Belanja Keperluan Perkantoran(RM) Tidak Dapat Dicairkan Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden
521219	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden	521211	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden
522151	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden	521219	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden
524111	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024	522112	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait Belanja Langganan Telepon(RM) Tidak Dapat Dicairkan Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden
524114	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024	522151	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden
524119	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024	522191	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait Belanja Jasa Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden
524219	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri(RM) Tidak Dapat Dicairkan Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024	523199	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait Belanja Pemeliharaan Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait

## DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025

## IV A. B L O K I R



DS:0596-9916-1630-6080

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan

Provinsi : [01] DKI JAKARTA

Kode dan Nama Satker : [445155] DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Halaman : IV.A. 8

(dalam ribuan rupiah)

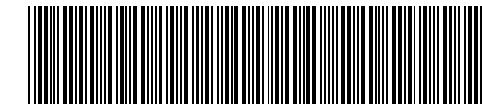
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
4127.PCA	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 92.400 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	4131 4131.ABG	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 28.825 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 203.700 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 155.350 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.670.000 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 101.954 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	536121 Belanja Penambahan Nilai Fisik Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 100.000 Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 941.843 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	<b>Perizinan Produk</b>		524219 Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 26.023 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 81.145 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		524219 Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 93.350 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 139.530 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		<b>Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif</b>
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.320 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		<b>Kebijakan Bidang Kesehatan</b>
			521111 Belanja Keperluan Perkantoran(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.200

## DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025

## IV A. B L O K I R



DS:0596-9916-1630-6080

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan

Provinsi : [01] DKI JAKARTA

Kode dan Nama Satker : [445155] DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Halaman : IV.A. 9

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
	<p>Perlu mendapatkan persetujuan/aranan presiden</p> <p>Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait</p> <p>521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM)</p> <p>Tidak Dapat Dicairkan Rp. 47.100</p> <p>Perlu mendapatkan persetujuan/aranan presiden</p> <p>Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait</p> <p>522151 Belanja Jasa Profesi(RM)</p> <p>Tidak Dapat Dicairkan Rp. 50.000</p> <p>Perlu mendapatkan persetujuan/aranan presiden</p> <p>Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait</p> <p>522191 Belanja Jasa Lainnya(RM)</p> <p>Tidak Dapat Dicairkan Rp. 100.000</p> <p>Perlu mendapatkan persetujuan/aranan presiden</p> <p>Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait</p> <p>524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)</p> <p>Tidak Dapat Dicairkan Rp. 367.500</p> <p>Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</p> <p>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</p> <p>524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)</p> <p>Tidak Dapat Dicairkan Rp. 456.600</p> <p>Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</p> <p>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</p> <p>524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)</p> <p>Tidak Dapat Dicairkan Rp. 509.850</p> <p>Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</p> <p>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</p> <p>524219 Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri(RM)</p> <p>Tidak Dapat Dicairkan Rp. 555.000</p>	4131.AFA	<p>Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</p> <p>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</p> <p>536121 Belanja Penambahan Nilai Fisik Lainnya(RM)</p> <p>Tidak Dapat Dicairkan Rp. 100.000</p> <p>Perlu mendapatkan persetujuan/aranan presiden</p> <p>Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait</p> <p><b>Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria</b></p> <p>524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)</p> <p>Tidak Dapat Dicairkan Rp. 153.995</p> <p>Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</p> <p>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</p> <p>524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)</p> <p>Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.270</p> <p>Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</p> <p>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</p> <p>524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)</p> <p>Tidak Dapat Dicairkan Rp. 483.803</p> <p>Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</p> <p>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</p> <p>524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)</p> <p>Tidak Dapat Dicairkan Rp. 239.440</p> <p>Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</p> <p>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</p> <p>524219 Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri(RM)</p> <p>Tidak Dapat Dicairkan Rp. 48.000</p> <p>Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</p> <p>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</p>

Jakarta, 02 Desember 2024  
Sekretaris Utama Badan POM

tt.  
Jayadi  
NRP. 69120503

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**  
**NOMOR : DIPA- 063.01.1.445155/2025**  
**IV B. C A T A T A N**



DS:0596-9916-1630-6080

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan

Provinsi : [01] DKI JAKARTA

Kode dan Nama Satker : [445155] DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

Halaman : IV.B. 1  
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024  
Sekretaris Utama Badan POM

ttd.  
Jayadi  
NRP. 69120503